

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA

**Abdul Rahman Rauf**

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aims to determine (1) how the implementation of policy on the application of electronic identity cards in the Department of Population and Civil Registration Regency of North Mamuju (2) the process of implementation of the public service of electronic identity cards in the Department of Population and Civil Registration Mamuju This is a descriptive qualitative Utara. Penelitian where the object of the research is to describe the communication factor, resources, bureaucracy and disposition in seeing how the implementation of public services in the application of the Electronic Identity Card. Datadilakukan through pengamatanterlibat collection, interview (determination of informants by using purposive sampling method), dokumentasidan literature review. The data is then classified and described and analyzed kualitatif. Hasil research shows that four factors that influence the success of an implementation kebijakanmenurut Edward III on the implementation of the Electronic Identity Card application at the Department of Population and Civil Registration Regency of North Mamuju. Communications Factor indicator is socialization, factor of implementation resource indicator is a technical executive personnel and supporting equipment readiness, implementation indicators disposition factor is the existence of SOPs implemented and implementation indicators bureaucratic structure factor bagaimana regulatory support. So that public services in North Mamuju Electronic Identity Card can be done systematically open and effective and efficient Keywords: implementation, electronic identification cards, public services, the Department of Population and Civil Registration, North MamujuKeywords: implementation, electronic identification cards, public services, the Department of Population and Civil Registration, North Mamuju*

**Keywords:** *implementation, electronic identification cards, public services, the Department of Population and Civil Registration, North Mamuju*

Teknologi yang semakin berkembang dalam menunjang berbagai aktivitas manusia saat ini tidak bisa kita hindari, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah segala bentuk kegiatan sehingga dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada kegiatan ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*egovernment*), yang didalamnya memiliki

program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP/KTP-el*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasis elektronik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh layanan informasi dan kemudahan bertransaksi. Seiring dengan hal tersebut penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi sesuatu hal yang mutlak. Salah satu program yang mulai diterapkan *Kartu Tanda Penduduk Elektronik*

(KTP-EL) sebagai bagian dari penerapan *e-government*. Kebijakan program ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap Negara dengan “menggandakan” KTP-nya.

Pelaksanaan Program Nasional Penerapan KTP Elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi *leading sector* di daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yang terkait dengan program KTP Elektronik. Penerapan teknologi KTP Elektronik merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan *identitas tunggal* setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”, dan pada pasal 101 huruf (a), undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012.

Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan KTP Elektronik Paling Lambat Akhir 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/27115/SJ tanggal 5 Juli 2010 Perihal Pemutakhiran Data

Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011 perihal Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan KTP Elektronik tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tentang Pelaksanaan Perekaman e-KTP Secara Reguler.

Salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam pelaksanaan KTP Elektronik dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan juga dengan legislator dengan diterbitkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara tentang Kesiapan Penyelesaian dan Penganggaran Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) dalam APBD Kabupaten Mamuju Utara.

Penerapan e-KTP secara Nasional yang dimulai penerapannya pada awal tahun 2010 hingga akhir tahun 2012 yang saat ini memasuki tahap pelaksanaan reguler pada tingkat kabupaten/kota. Di awal tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam perubahan undang-undang tersebut terdapat beberapa poin yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis penerapan KTP Elektronik.

Menurut Edward III, model implementasi kebijakan disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, yang mana lebih lanjut Edward III mengemukakan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya,

disposisi, dan struktur birokrasi (Edward dalam Winarno, 2007:49).

Faktor Komunikasi dalam Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Faktor Sumberdaya diperlukan dikarenakan jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumensaja.

Faktor Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian yang terfokus pada “Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara”.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Oktober tahun 2015. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang panduan kartu tanda penduduk penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL/e-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara.

Implementasi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

### 1. *Komunikasi*

Komunikasi merupakan variabel yang berperan penting dalam suatu organisasi. Dalam melakukan aktivitas keseharian seseorang bisa dipastikan akan melakukan kegiatan komunikasi. Pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lain. Keberhasilan implementasi kebijakan mutlak diperlukan suatu komunikasi yang baik. Sehingga implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Dalam melaksanakan program KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan KTP Elektronik. Pelaku *leading sector* program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memainkan peranan komunikasi secara baik, karena faktor komunikasi merupakan salah satu penentu keberhasilan program KTP Elektronik. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan implementor dalam menyampaikan dan mensosialisasikan tata cara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan implementasi program KTP Elektronik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengenai penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El/e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Agar informasi mengenai pelaksanaan program tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi dengan mengundang semua lapisan masyarakat ke

setiap kantor camat yang dilakukan secara berkala untuk diberi pengarahan mengenai bagaimana tahapan pelaksanaan KTP Elektronik. Setelah sosialisasi pada tingkat Kecamatan kemudian diharapkan nantinya dilaksanakan hingga tingkat Kelurahan/Desa. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tatap muka langsung kepada masyarakat ditingkat kecamatan menjelaskan bagaimana proses penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara. Selain sosialisasi dengan tatap muka juga dengan menggunakan media lainnya yaitu media elektronik, media cetak, spanduk, baliho, banner, billboard, baju kaos dan sebagainya hingga menjadi salah satu sponsor tim olah raga.

Sosialisasi KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 12 Kecamatan Kabupaten Mamuju Utara yang dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti koran lokal, banner. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan tentang “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku “seumur hidup” dan pemberian penjelasan akan kegunaan KTP Elektronik dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke tempat perekaman KTP Elektronik di setiap Kantor Kecamatan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan sudah memberikan sosialisasi dan kejelasan informasi kepada dan warga masyarakat Kecamatan Pasangkayu.

Berdasarkan hasil observasi dan Wawancara di lapangan, ditemukan fakta bahwa belum semua warga yang telah selesai mengurus perekaman KTP Elektronik belum dapat mengambil KTP Elektronik

dikarenakan belum selesai di cetak, hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam pemberian informasi belum maksimal, betapa tidak masyarakat sangat mengharapkan output dari perekaman dan pembuatan KTP Elektronik tersebut dapat segera terealisasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengurus urusan administrasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing warga masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Kesimpulan dari hasil diatas bahwa Implementasi kebijakan KTP Elektronik dilihat dari indikator sosialisasi sudah berjalan baik namun pada aspek komunikasi menurut penulis terjadi masalah tersendiri karena bahwa sosialisasi pembuatan KTP Elektronik belum memberikan konsistensi informasi tentang penerbitan hasil jadiKTP Elektronik kepada sasaran atau target group penduduk wajib KTP. situasi tersebut menimbulkan *miss communication* karena dapat mengakibatkan keterlambatan pelayanan publik kepada masyarakat yang berujung pada munculnya perbedaan persepsi pada tingkat masyarakat.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah indikator dan titik sentral terlaksana tidaknya implementasi kebijakan sebab apabila implementator kekurangan sumberdaya maka sesuatu yang akan di implementasikan tidak akan berjalan efisien dan efektif, sumberdaya dapat berupa manusia dan sarana dan anggaran. Sumberaya manusia terkait langsung dengan kompetensi, kompetensi yang dimaksud berupa keterampilan dan pengetahuan, pengetahuan tersebut berguna dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran dari sebuah kebijakan. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh.

Meskipun isi dari kebijakan tersebut baik namun aparatur yang mengkomunikasikannya kepada publik tidak memiliki kompetensi yang tepat maka publik bisa keliru atau bahkan salah persepsi.

Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung implementasi program KTP Elektronik dengan penyediaan sumber daya untuk melaksanakan program KTP Elektronik ini. Terkait sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di kelompokkan menjadi komponen yakni Sumber Daya Manusia, Sarana dan Anggaran.

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan program KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara telah mengikutsertakan staf teknis yaitu Administrator Database dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan program KTP Elektronik guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib KTP.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menggambarkan bahwa kondisi beberapa peralatan yang kurang baik disaat proses perekaman KTP Elektronik sangat berpengaruh, jumlah masyarakat yang semestinya dapat terlayani lebih banyak tertunda oleh kerusakan peralatan, ditambah masih terbatasnya peralatan yang digunakan, akibat lain dari proses tersebut, kenyamanan masyarakat yang dilayani juga berkurang.

Yang terlihat dilapangan menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang bekerja sebagai tenaga operator sudah baik, tempat pelayanan berupa tempat duduk antrian juga tersedia, namun jumlah operator dan peralatan serta dukungan dana masih kurang

untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan perekaman KTP Elektronik. Hal ini semakin menjadi masalah saat peralatan mengalami kerusakan, akibatnya kenyamanan masyarakat yang dilayani berkurang, jumlah masyarakat yang telah selesai proses perekaman menjadi berkurang pula.

Berdasarkan kesimpulan tersebut menurut penulis pegawai yang menjadi tenaga operator masih kurang serta kurangnya sumberdaya peralatan yang satu dengan lainnya. Dikaitkan dengan aspek komunikasi, walaupun sosialisasi dilakukan secara rutin namun peralatan dan sumberdaya jumlah operator dan dukungan anggaran yang masih kurang dalam menangani pelaksanaan KTP Elektronik maka mengakibatkan realisasi program KTP Elektronik kurang efisien karena dapat menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta bertambahnya waktu perbaikan peralatan, masyarakat memberikan respon kurang baik, biaya yang dikeluarkan bertambah untuk biaya perbaikan alat dan mengurangi antusiasme warga dalam mengurus KTP.

### **3. Disposisi**

Yang dimaksud dari sikap implementator seperti komitmen, kemauan, kejujuran, dan sifat demokratis. Keberhasilan suatu program implementasi sangat tergantung kepada komitmen yang kuat dari seluruh unsur yang terlibat didalamnya. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari suatu kebijakan.

Disposisi merupakan salah satu unsur yang mempunyai konsekuensi penting guna terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif bagi aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara. Disposisi ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan

dilakukan. Dalam hal ini pengorganisasian sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan KTP Elektronik, karena semua program memerlukan rincian tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu, kesiapan pengorganisasian sangat diperlukan seperti untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab setiap aparatur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung dan mensukseskan program KTP Elektronik dapat terlihat, ditunjukkan dengan melakukan sistem rekrutmen pegawai operator dan tenaga teknis lainnya berdasarkan kompetensi dan keterampilan aparturnya. Hal ini penting karena pemahaman arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang mutlak. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan ketika mereka tidak sepenuhnya menyadari apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

Kesungguhan dan kemauan yang tinggi oleh aparatur baik itu di kecamatan maupun di dinas sendiri ditunjukkan dengan antusiasme dan peningkatan kinerja. Aparatur memberikan kepastian, ketegasan dan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan KTP Elektronik. Pemahaman yang tinggi ditunjukkan dengan terealisasinya pelaksanaan implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara dan menggugah kesadaran masyarakat sehingga membangkitkan motivasi untuk pelaksanaan implementasi kebijakan KTP Elektronik. Oleh karena itu, kemauan, pengetahuan, pendalaman dan pemahaman yang tinggi terkait tugas yang diberikan maka aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dapat melaksanakan implementasi kebijakan KTP Elektronik tersebut.

Dalam pelaksanaan program KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara,

kemauan dan kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan aparatur dengan, peningkatan kinerja. Pendidikan yang memadai juga sangat menunjang dalam program ini dengan adanya beberapa aparatur bergelar sarjana Strata Satu dapat memberikan informasi, pengertian, pengetahuan, penjelasan dan ketegasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan KTP ELEktronik.

Hal ini bermanfaat bagi karena dapat menggugah kesadaran masyarakat sehingga membangkitkan motivasi untuk pelaksanaan implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara. Oleh karena itu, dengan semangat, pengetahuan, dan pemahaman yang tinggi maka aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menggambarkan bahwa kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung kemauan dan kepedulian serta semangat yang tinggi dalam memberikan pengertian, pengetahuan, kepastian, ketegasan dan penjelasan terhadap masyarakat tentang implementasi kebijakan KTP Elektronik.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keinginan, komitmen dan sikap keterbukaan para implementor telah menunjukkan bahwa respon positif dari masyarakat yang dilayani akan terwujud, dengan ditunjukkan pula masyarakat memberikan masukan dan saran guna perbaikan sebuah kebijakan yang diimplementasikan, termasuk implementasi KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Utara.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah

dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi kedudukan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah, koordinasi dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur yang terlalu besar akan cenderung berujung pada prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan dapat melemahkan pengawasan. Ketika para pelaksana kebijakan memahami tugas dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka masih mendapatkan hambatan implementasi oleh struktur organisasi yang besar. Walaupun sumber daya yang mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para implementor mengetahui cara mengimplementasikan dan memahami tujuan yang akan dicapai, dan mereka mempunyai kemauan untuk melakukannya akan tetapi struktur organisasi terlalu besar maka implementasi masih dapat terkendala. Struktur Birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, pembagian tugas, struktur organisasi, dan *Standar Operasional Procedure (SOP)*.

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam tugasnya sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merealisasikan program membuat pola rincian pembagian tugas yang merupakan suatu pedoman yang menggambarkan pembagian bidang-bidang, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait dalam suatu organisasi.

Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tersusun dengan baik yang dinilai oleh masyarakat yang mengurus KTP Elektronik, karena melihat cara bekerja aparaturnya dilakukan dengan tahapan-tahapan dan ketelitian. Masyarakat merasa senang, aman, dan nyaman melihat cara kinerja yang dipraktekkan oleh aparatur dan berikan kepada masyarakat yang sedang mengurus pembuatan KTP Elektronik.

Wewenang yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara merupakan pengendalian program dalam implementasi kebijakan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkoordinasi dengan bidang-bidang unit kerja untuk melaksanakan program kerja sumberdaya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga program selama ini yang telah direncanakan dapat terwujud. Dalam merealisasikan tugas program implementasi KTP Elektronik, implemmentor mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam pelayanan publik.

Sementara Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara yang dijabarkan dalam empat bagian yang secara garis besar menjabarkan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel dengan mendayagunakan seluruh aparatur, mewujudkan kegiatan pembangunan

yang berbasiskan partisipasi masyarakat, mewujudkan pemenuhan SDM yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa, mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, mewujudkan terpeliharanya kondisifitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketentraman wilayah.

Dalam menjalankan misinya, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, dalam memberikan pelayanan kepada penduduk wajib KTP.

Dari hasil penelitian melalui observasi langsung dan wawancara dengan beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan KTP Elektronik memiliki tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dengan tujuan agar program KTP Elektronik dapat berjalan sesuai dengan capaian yang diinginkan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan pada pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa secara umum Implementasi Penerapan KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara telah dilakukan dengan baik hal ini dilihat dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yaitu 4 faktor penunjang pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: *Faktor Komunikasi* dalam Implementasi kebijakan KTP Elektronik dilihat dari indicator sosialisasi sudah berjalan baik namun pada aspek komunikasi menurut penulis terjadi masalah tersendiri karena sosialisasi pembuatan KTP Elektronik belum memberikan konsistensi informasi tentang penerbitan hasil jadi KTP Elektronik kepada sasaran atau target penduduk wajib KTP; *Faktor Sumber daya* dalam penerapan



KTP Elektronik ini menurut penulis pegawai yang menjadi tenaga operator masih kurang serta kurangnya sumber daya peralatan yang satu dengan lainnya; *Faktor Disposisi* dalam penelitian ini dapat dilihat dari komitmen yang menjadi bagian dari disposisi telah dilakukan dengan kesungguhan dan kemauan yang dalam membekali para operator dengan mengikutsertakan pelatihan dan pendidikan tenaga teknis operator komputer sebelum melaksanakan tugasnya; *Faktor Struktur Birokrasi* dalam implementasi penerapan KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara telah memiliki tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dengan tujuan agar program KTP Elektronik dapat berjalan sesuai dengan capaian yang diinginkan.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disusun suatu strategi yang harus dilakukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan serupa yang mengarah pada pelayanan publik. Strategi tersebut meliputi:

1. Prinsip dan tahapan kegiatan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara sistematis.
2. Implementasike bijakan public harus mengandung prinsip keterbukaan, rasionalitas dan motivasi yang benar dan tepat dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.
3. Tahapan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan public harus dilalui secara sistematis dimulai dari pemaparan kebijakan, sosialisasi kebijakan dan hasil pemaparan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan hingga tahap evaluasi program.
4. Semua tahapan pelaksanaan itu harus melibatkan semua komponen: pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

### UCAPAN TERIMA KASI

Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof Dr. H. Sultan M, M.Si, selaku ketua pembimbing dan Ibu Dr. Hj. Mustainah, M.Si selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian dan pembuatan tesis serta jurnal ini. Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya beliau berdua diberikan limpahan berkah, rahmat dan hidayah atas segala amal ibadahnya membimbing penelitian dan penyelesaian artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. "*Analisis Kebijakan Publik*". Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Maleong J., Lexy. 2005. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 *tentang* Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 *tentang* Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 *tentang* Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 *tentang* Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 *tentang* Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 *tentang* Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 *tentang* Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 *tentang* Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 *tentang* Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *tentang* Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *tentang* Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *tentang* Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *tentang* Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang* Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Winarno, Budi. 2005. *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. Media Presindo, Yogyakarta.